

## Nurhadi Minta Dipindahkan ke Rutan Polres Jaksel

JAKARTA (IM) - Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, minta dipindahkan dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rutan Polres Jakarta Selatan (Jaksel). Permohonan itu telah diajukan Nurhadi ke Pengadilan Tinggi Jakarta.

"Benar, berdasarkan informasi yang kami terima, terdakwa Nurhadi mengajukan permohonan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta agar pindah rumah tahanan dari Rutan cabang KPK ke Rutan Polres Jakarta Selatan dengan alasan kesehatan dan sudah usia lanjut," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada wartawan, Minggu (21/3).

Ali menyebut KPK tentu menghargai permohonan Nurhadi tersebut. Namun, Ali menegaskan bahwa selama Nurhadi ditahan di Rutan KPK pun hak-haknya

tetap dipenuhi dengan baik. "Perlu kami tegaskan bahwa hak-hak seluruh tahanan di Rutan KPK telah kami penuhi, termasuk soal kesehatan tentu menjadi prioritas utama. Rutan KPK juga memiliki dokter klinik yang siap kapanpun memeriksakan kesehatan para tahanan," ucapnya.

Ali menilai alasan Nurhadi mengajukan pindah penahanan karena kesehatan berlebihan. Dia berharap majelis hakim menolak permohonan Nurhadi.

"Untuk itu kami berharap majelis hakim banding menolak permohonan terdakwa tersebut karena kami berpandangan sama sekali tidak ada urgensinya pemindahan tahanan dimaksud," katanya. "Terlebih selama proses penyidikan maupun persidangan kami nilai terdakwa Nurhadi juga tidak kooperatif," tambahnya. ■ **mei**

# 2 | Polhukam

IDN/ANTARA



## REVITALISASI HUTAN MANGROVE DUMAI MENJADI EKOWISATA PESISIR

Aktivist lingkungan hidup Darwis M. Soleh membacakan deklarasi di hutan mangrove pada peringatan Hari Hutan Internasional di Dumai, Riau, Minggu (21/3). Pemerintah Kota Dumai merevitalisasi kawasan hutan mangrove seperti menanam bakau dan membersihkan sampah plastik di kawasan tersebut karena akan dijadikan kawasan ekowisata pesisir.

# Rencana Pemerintah Impor Beras dari Thailand Menuai Kritik

## Menteri PPPA Sebut Perempuan Pelaut Rentan Alami Kekerasan dan TPPO

JAKARTA (IM) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati mendorong penghentian kasus kekerasan, diskriminasi, stigmatisasi, dan perdagangan perempuan, khususnya di bidang kelautan serta perikanan.

Ia menyebut, perempuan yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan rentan mengalami kekerasan hingga perdagangan orang.

"Pada saat bekerja perempuan pelaut juga lebih rentan mengalami kekerasan dan perlakuan salah lainnya, bahkan menjadi korban dari modus tindak pidana perdagangan orang (TPPO)," kata Bintang, melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (21/3).

Mengutip data Kementerian Perhubungan pada 2019, Bintang menerangkan, ada 18.572 pelaut perempuan di Indonesia. Mereka menduduki sejumlah jabatan serta berasal dari berbagai tingkat pendidikan.

Mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, perempuan yang berprofesi di bidang kelautan dan perikanan sejatinya berpotensi besar memajukan ekonomi bangsa. Namun, kata Bintang, hingga saat ini masih terdapat stigma bahwa perempuan sebaiknya hanya bekerja di ranah domestik.

"Stigma ini seringkali membuat perusahaan pelayaran enggan mempe-

kerjakan perempuan pelaut," ujar Bintang.

Menindaklanjuti persoalan ini, pemerintah telah merevisi Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO (GT PP TPPO). Pemerintah juga menugaskan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai anggota GT PP TPPO.

Melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemerintah juga menegaskan larangan tindakan diskriminasi, baik bagi pekerja laki-laki maupun pekerja perempuan. "Untuk mendukung pencapaian itu, Kementerian PPPA mendapatkan tambahan tugas dan fungsi yaitu menyediakan layanan rujukan akhir. Hal ini diwujudkan melalui peluncuran call center pengaduan bagi masyarakat, yaitu Layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA 129)," kata Bintang.

Bintang menyebut, diperlukan kerja sama berbagai pihak dalam memastikan pemenuhan hak dan perlindungan bagi perempuan pelaut. Oleh karenanya ia meminta seluruh pihak menyatukan kekuatan, menyampingkan ego dan saling mendukung dalam upaya ini.

"Dengan begitu, kami yakin perempuan pelaut Indonesia dapat berkiprah, berperan aktif, bahkan memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa untuk membangun Indonesia maju," katanya. ■ **mei**

Impor beras saat ini dianggap tidak tepat karena akan panen raya. Impor beras dinilai hanya akan menyengsarakan petani.

JAKARTA (IM) - Rencana pemerintah mengimpor beras dari Thailand menuai kritikan dari berbagai kalangan karena dianggap tidak sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kritikan keras disampaikan Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. "Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh presiden? Kalau alasannya

kualitas produk beras kita tidak memenuhi standar yang ada lalu siapa yang akan membeli beras rakyat?" ungkap Anwar melalui keterangan resminya, Minggu (21/3).

Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah tersebut mengaku terkejut ketika adanya wacana impor beras. Sebab sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi memastikan bahwa pemerintah tidak akan melakukan importasi beras

pada masa panen raya karena berpotensi menghancurkan harga beras petani.

"Apalagi, kalau kita kaitkan dan hubungkan dengan pernyataan presiden yang telah mengimbau seluruh warga masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri dan jangan membeli produk asing apalagi produk-produk tersebut sudah bisa disuply oleh anak-anak bangsa," bebrny. Anwar menyatakan bahwa kebijakan impor beras akan menyengsarakan para petani beras. Ia meminta agar para menteri mematuhi instruksi Presiden Jokowi yang meminta untuk lebih menghargai dan cinta terhadap produk lokal.

Kritikan keras juga disampaikan Plt. Ketua Umum Par-

tai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganessa, melalui akun Twitter @psi\_id, PSI mengungkap 4 alasan penolakan rencana impor beras.

Pertama, impor beras seharusnya dilakukan dengan mempertimbangan waktu panen. PSI menilai, hingga bulan Juni stok beras masih aman karena dipotong panen April-Mei.

Sejak mencuat rencana pemerintah untuk mengimpor beras, harga gabai di petani langsung terkejut. Saat ini, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani se-

jumlah wilayah sudah di bawah Rp 3.800 per kilogram. Angka ini merosot tajam dibandingkan September 2020 yang mencapai harga Rp 4.800 per kilogram.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut impor beras perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stok beras nasional dan menstabilkan harga. Meski diprediksi akan terjadi kenaikan produksi beras sepanjang Januari hingga April 2021, Lutfi menyebut hal itu baru bersifat ramalan. ■ **mei**

# Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak Korupsi Bansos Covid-19

JAKARTA (IM) - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi membuka pos pengaduan masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial Covid-19, Minggu (21/3).

Koalisi itu terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Change.org.

Pewakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, pos pengaduan tersebut ditujukan

bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek namun mengalami permasalahan dalam pembagiannya.

"Pos pengaduan ini adalah upaya untuk dapat memecahkan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi," kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (21/3).

Kurnia menjelaskan, pengaduan yang masuk nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum bersama, yakni menuntut pemu-

lian kerugian masyarakat. Selain itu, informasi yang dihimpun juga diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan mengenai bansos dan jaminan sosial lainnya agar lebih transparan dan akuntabel.

Adapun pengaduan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada link <http://s.id/poskorbanbansos> atau melalui hotline telepon/Whatsapp pada nomor 0881 0246 58639.

"Pos pengaduan akan dibuka mulai 21 Maret 2021 hingga 4 April 2021," ucap Kurnia. ■ **mei**

## Menpan RB Tjahjo Kumolo Ajak ASN hingga TNI-Polri Lawan Hoaks

JAKARTA (IM) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengajak aparatur sipil negara (ASN) hingga jajaran TNI-Polri untuk melawan informasi hoaks.

"Saya selaku Menpan RB mengajak kepada seluruh teman-teman ASN, termasuk jajaran TNI dan Polri, khususnya jajaran staf dan pimpinan di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melawan hoaks," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, Minggu (21/3).

Tjahjo menyebut, saat ini hasutan yang berisi ujaran kebencian begitu gampang disebarkan dengan berbagai modusnya, terutama lewat dunia maya.

Menurutnya, hal itu harus

diwaspadai karena hasutan yang berisikan kebencian sangat berbahaya. Sebab, hasutan tersebut bisa mengancam keselamatan dan persatuan masyarakat, memicu konflik antar kelompok masyarakat, bahkan mengancam keberagaman dan keutuhan NKRI itu sendiri.

"Karenanya seluruh ASN harus waspada terhadap hasutan-hasutan yang berisi ujaran kebencian," katanya.

Tjahjo mengatakan, kebebasan berpendapat yang disampaikan warga pada dasarnya dijamin konstitusi. Namun, kebebasan itu tidak lantas kemudian disalahgunakan dengan bebas mencari maki, saling menghujat, saling menghina, atau saling mencemarkan nama baik di ranah publik. Terlebih, menghasut orang lain untuk saling membenci terhadap kelompok masyarakat lainnya. ■ **han**

PT SURYA ESA PERKASA Tbk DAN ENTITAS ANAK									
Kantor Pusat : DBS Bank Tower 18 <sup>th</sup> Floor, Ciputra World 1 Jakarta, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5 Jakarta Selatan 12940, INDONESIA									
Tel : +62 21 2988 5600, Fax: +62 21 2988 5601, www.sep.co.id									
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b> 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)									
ASET	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2020	31 Des 2019					
	103.415.874	190.464.232	10.618.196	11.576.810					
<b>ASET LANCAR</b>									
Kas dan setara kas	73.777.438	147.288.644	1.633.623	260.225					
Piutang usaha	2.448.615	12.885.592	1.001.897	114.968					
Piutang lain-lain	20.354	90.570	543.079	360.125					
Piutang ketag	21.753.597	15.138.916	1.511.742	1.211.777					
Piutang ketag	1.726.681	8.881.266	1.000.000	10.000.000					
Persediaan	1.726.681	8.881.266	63.733.971	52.897.265					
Pajak dibayar dimuka	3.656.258	5.714.612	5.671.048	5.663.506					
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	32.931	464.632	181.011	181.011					
Uang jaminan	103.415.874	190.464.232	94.894.567	82.084.677					
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>									
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>									
Utang usaha			336.930.143	391.330.759					
Piutang ketag			33.344.002	38.755.044					
Utang lain-lain			145.255	282.808					
Piutang ketag			2.527.723	1.899.519					
Utang bank			3.800.019	3.620.594					
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			385.378.480	504.791.130					
Utang institusi keuangan			8.531.338	72.805.805					
Utang bank			480.273.047	586.875.807					
Liabilitas sewa									
Liabilitas jangka panjang									
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun									
Liabilitas keuangan									
Utang bank									
Liabilitas sewa									
Liabilitas imbalan kerja									
Derivatif keuangan									
Provisi									
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang			480.273.047	586.875.807					
<b>EKUITAS</b>									
Modal saham - nilai nominal Rp 10 per lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 2019			15.495.810	14.440.441					
Modal dasar - 22.000.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 2019			90.902.649	78.886.551					
Modal ditempatkan dan disetor - 15.560.887.000 lembar saham pada 31 Desember 2020 dan 14.300.000.000 lembar saham pada 31 Desember 2019			15.495.810	14.440.441					
Tambahan modal disetor			15.495.810	14.440.441					
Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali			282.808	282.808					
Penghasilan komprehensif lain			17.692.607	3.620.594					
Saldo laba			2.165.100	2.165.100					
Dicadangkan			69.934.323	86.054.831					
Dicadangkan			196.384.097	187.451.325					
Belum dicadangkan			115.396.316	120.985.292					
Jumlah Ekuitas			311.780.413	308.436.617					
<b>KEPENTINGAN NON-PENGENDALI</b>									
Jumlah Ekuitas			792.053.460	895.312.424					
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>									
Jumlah Ekuitas			792.053.460	895.312.424					
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>									
Jumlah Ekuitas			792.053.460	895.312.424					
<b>LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN</b> Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)									
Saldo per 31 Desember 2018 setelah penyalangan kembali	Modul disetor	Tambahan modal disetor	Penghasilan komprehensif lain			Saldo laba	Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan	Kepentingan non-pengendali	Jumlah ekuitas
			Selisih transaksi ekuitas dengan pihak non-pengendali	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	Surplus revaluasi aset tetap				
14.440.441	78.886.551	282.808	(1.512.357)	7.032.128	467.157	3.873.972	-	311.238.334	
14.440.441	78.886.551	282.808	(1.512.357)	7.032.128	467.157	3.873.972	-	311.238.334	
Penambahan kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	12.981.267	-	12.981.267
Laba (Rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	10.314.314	-	10.314.314
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	(2.048.004)	-	(2.048.004)
Reklasifikasi cadangan revaluasi dari penghasilan komprehensif lain ke saldo laba	-	-	-	-	-	-	(3.535.037)	-	(3.535.037)
Saldo per 31 Desember 2019	14.440.441	78.886.551	282.808	(1.512.357)	4.326.859	620.971	185.121	120.985.292	308.436.617
Penambahan modal saham	965.169	12.016.098	-	-	-	-	-	-	12.981.267
Penambahan kepentingan non-pengendali	-	-	-	-	-	-	-	-	10.314.314
Rugi tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.048.004)
Laba (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.048.004)
Reklasifikasi cadangan revaluasi dari penghasilan komprehensif lain ke saldo laba	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.535.037)
Saldo per 31 Desember 2020	15.405.610	90.902.649	282.808	(1.512.357)	20.651.354	599.351	(2.045.741)	115.396.316	311.780.413

LPG Plant:  
Jl. Raya Palembang - Indralaya Km. 17  
Simpang Y Palembang - Sumatera Selatan  
INDONESIA

Ammonia Plant:  
Jl. Poros Sulawesi, Desa Uso Kec. Batul  
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah  
INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN			
Untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 (Disajikan dalam Dolar AS, kecuali dinyatakan lain)			
	2020	2019	
Penerimaan dari pelanggan	185.950.772	229.705.730	
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(148.624.335)	(167.928.390)	
Kas dihasilkan dari operasi	37.326.437	61.777.340	
Pembayaran pajak penghasilan	(497.055)	(3.412.588)	
Pengembalian pajak	8.961.903	26.436.550	
Penerimaan bunga	1.086.190	2.884.417	
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	46.877.475	87.685.719	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			
Perolehan aset tetap	(5.175.728)	(4.916.618)	
Hasil penjualan aset tetap	-	9.290	
Pencairan (pelunasan) obligasi kinerja	(56.000.000)	56.000.000	
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	(61.175.728)	51.092.672	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			
Penerimaan pinjaman dari institusi keuangan dan utang bank	-	3.240.423	
Pembayaran utang institusi keuangan dan utang bank	(53.188.062)	(68.554.395)	
Pembayaran beban keuangan	(26.693.835)	(31.556.338)	
Pembayaran liabilitas sewa	(312.432)	-	
Penerimaan penerbitan saham	12.981.267	-	
Penerimaan penambahan saham di entitas anak dari kepentingan nonpengendali	8.000.109	-	
Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(59.212.953)	(66.870.310)	
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>			
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN</b>	<b>73.511.206</b>	<b>41.908.081</b>	
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN</b>	<b>14.298.253</b>	<b>105.380.563</b>	

Catatan:  
Informasi keuangan di atas diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Gani Sigro & Handayani (firma anggota Grant Thornton International Ltd) yang dalam laporannya tanggal 20 Maret 2021 beropini bahwa laporan keuangan konsolidasian PT Surya Esa Perkasa Tbk dan Entitas Anaknya menyajikan secara wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal.